

PERAN *AFRICAN UNION* (AU) DALAM MENGHADAPI PERSOALAN POLITISASI UPAH DI NIGERIA

Oleh: Nadya Tri Andansari

Pembimbing: Dr. Saiman, S.IP., M.Si

Program Studi Hubungan Internasional – Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Politisasi upah dan kesenjangan sosial di Nigeria telah menjadi isu signifikan dalam satu dekade terakhir. Meskipun *African Union* (AU) telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait keadilan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan sosial di Nigeria masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran AU dalam merespons politisasi upah dan kesenjangan sosial di Nigeria pada periode 2012-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AU telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, implementasinya terhambat oleh lemahnya koordinasi dengan pemerintah Nigeria, kurangnya penegakan hukum, serta kepentingan politik domestik. Akibatnya, protes sosial terus terjadi dan kesenjangan sosial tetap menjadi isu utama di Nigeria. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AU perlu memperkuat mekanisme pemantauan dan penegakan kebijakan yang lebih ketat untuk mengatasi politisasi upah secara lebih efektif.

Kata Kunci: *African Union*, Politisasi Upah, Kesenjangan Sosial, Nigeria, Organisasi Regional.

ABSTRACT

The politicization of wages and social inequality in Nigeria has become a significant issue over the past decade. Although the African Union (AU) has issued various policies related to social justice and labour welfare, their impact on Nigeria's economic and social conditions remains a topic of debate. This study aims to analyze the role of the AU in responding to the politicization of wages and social inequality in Nigeria between 2012 and 2022. The findings reveal that while the AU has introduced policies to address social inequality and improve labour welfare, their implementation has been hindered by weak coordination with the Nigerian government, a lack of law enforcement, and domestic political interests. As a result, social protests persist, and social inequality continues to be a major issue in Nigeria. The study concludes that the AU needs to strengthen monitoring mechanisms and enforce stricter policies to more effectively address the politicization of wages.

Keywords: *African Union, Politicization of Wages, Social Inequality, Nigeria, Regional Organizations.*

A. PENDAHULUAN

Nigeria, salah satu negara terbesar di Afrika dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa, sangat bergantung pada sektor perminyakan, menjadikannya salah satu produsen minyak terbesar di dunia.¹ Meskipun kaya dengan GDP yang diperkirakan mencapai \$506,6 miliar, Nigeria menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Ketidakstabilan keamanan nasional mulai terjadi sejak kudeta militer pada tahun 1966, terutama oleh kelompok etnis Ibo yang mendominasi politik. Ketidakstabilan ini terus berlangsung, diperburuk oleh konflik-konflik politik, korupsi, dan kemerosotan ekonomi yang mengubah Nigeria menjadi salah satu negara termiskin di dunia.²

Salah satu masalah yang paling mendesak akibat ketidakstabilan ini adalah upah yang tidak memadai bagi para pekerja. Baik di sektor formal maupun informal, banyak pekerja yang tidak mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, sehingga banyak yang harus bekerja lebih dari satu pekerjaan demi memperbaiki kualitas hidup mereka.³ Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini antara lain inflasi yang tinggi, pengangguran yang meluas, dan ketidakstabilan ekonomi akibat rendahnya daya beli pekerja yang

kemudian mengurangi permintaan domestik dan menghambat proses produksi serta investasi.⁴

Kebijakan upah seringkali digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh dukungan politik atau balas dendam. Fenomena ini disebut sebagai politisasi upah, yang terjadi ketika upah digunakan untuk mempengaruhi dan mengendalikan pekerja. Praktik ini biasanya dilakukan oleh pemerintah, pengusaha, atau aktor berkuasa lainnya untuk membeli loyalitas politik, menekan perlawanan, atau mempertahankan kontrol sosial.⁵ Dampak dari politisasi upah sangat luas, tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan pekerja, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan sosial yang dapat memicu protes.

Protes seringkali disebabkan oleh ketidakadilan dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah serta institusi yang seharusnya melindungi mereka. Banyak pekerja merasa diperlakukan tidak adil, mendorong mereka untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan harapan agar pemerintah segera mengatasi masalah tersebut. Protes ini tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi yang sulit, tetapi juga adanya indikasi krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi. Di Nigeria, gerakan sosial

¹ Falola, Toyin. *Nigeria: History and Culture*. Greenwood Press, 2008.

² *Ibid.*

³ World Bank. "Tackling Inequality Vital to End Extreme Poverty by 2030." Press release, October 2, 2016. <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/02/tackling-inequality-vital-to-end-extreme-poverty-by-2030>.

⁴ Oladejo, M. T., & Komolafe, G. (2019). *Women's work and taxation in the informal economy: Issues in urban governance in Nigeria*.

Centre for Democracy and Development (CDD). Retrieved from

<https://www.cddwestafrica.org/reports/women-s-work-and-taxation-in-the-informal-economy-issues-in-urban-governance-in-nigeria/>

⁵ World Bank. "Tackling Inequality Vital to End Extreme Poverty by 2030." Press release, October 2, 2016.

<https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/02/tackling-inequality-vital-to-end-extreme-poverty-by-2030>.

melibatkan berbagai kelompok pekerja dan organisasi masyarakat sipil yang menuntut perbaikan kondisi kerja dan upah. Gerakan ini sering kali menghadapi tindakan represif dari pemerintah, termasuk kekerasan dan penangkapan, yang justru memperburuk situasi dan meningkatkan kemarahan publik.⁶

Contohnya, pada tahun 2012, terjadi 'Protes Marikana' di Afrika Selatan dan gerakan '*Occupy Nigeria*' yang dipicu oleh pencabutan subsidi bahan bakar dan protes massal. Selain itu, pada tahun 2015-2016, terjadi protes di Zimbabwe dan Ethiopia yang menuntut reformasi ekonomi dan politik serta perbaikan kondisi kerja. Meskipun situasi ini semakin diperburuk oleh pandemi COVID-19 dan konflik di Ukraina, keluhan-keluhan tersebut sebenarnya sudah ada jauh sebelum peristiwa-peristiwa tersebut.⁷

African Union (AU), sebagai organisasi regional yang mewakili negara-negara Afrika, memiliki mandat untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan pembangunan ekonomi di seluruh benua. AU memegang peranan penting dalam menangani politisasi upah melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak pekerja dan keadilan sosial.⁸ Politisasi upah merupakan isu krusial yang perlu segera ditangani oleh AU, terutama dalam konteks Agenda 2063, yang merupakan kerangka pembangunan jangka panjang untuk menciptakan Afrika yang inklusif dan

berkelanjutan. Penanganan politisasi upah sangat penting karena berdampak negatif pada kesejahteraan pekerja, memperburuk ketidaksetaraan sosial, dan bertentangan dengan tujuan AU untuk mewujudkan pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, dan pengentasan kemiskinan.⁹

AU telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi politisasi upah di Afrika. Contohnya adalah kebijakan yang terkait dengan hak-hak pekerja dan kondisi kerja. Salah satunya adalah *African Continental Free Trade Area* (AFCFTA), yang diluncurkan pada 2018 dan mulai berlaku pada 2021, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan intra-Afrika, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan upah. Selain itu, AU meluncurkan *Social Protection Plan for Informal Economy and Rural Workers* (SPIREWORK) pada 2011, yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di sektor informal dan pedesaan yang sering kali menerima upah rendah. AU juga mengadopsi *Decent Work Agenda* pada 2004, bekerja sama dengan *International Labour Organization* (ILO), untuk mempromosikan pekerjaan yang layak dan mengurangi ketidaksetaraan upah di seluruh benua. Namun, efektivitas kebijakan ini sering terbatas oleh tantangan dalam penegakan hukum dan ketidakstabilan ekonomi.

⁶ Daley, John, Danielle Wood, and Kate Griffiths. *A Crisis of Trust: The Rise of Protest Politics in Australia*. Grattan Institute, February 2018. <https://grattan.edu.au/report/a-crisis-of-trust/>

⁷ CNN. (2012, Januari 6). Nigeria fuel protest explained.

<https://edition.cnn.com/2012/01/06/world/africa/nigeria-fuel-protest-explained/index.html>

⁸ *African Union. Agenda 2063*. Accessed October 1, 2024. <https://oau60.au.int/en/agenda-2063>

⁹ *Ibid.*

Secara keseluruhan, meskipun AU telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial akibat politisasi upah, efektivitasnya seringkali dipengaruhi oleh implementasi dan kondisi di tingkat nasional.¹⁰ Ketidakstabilan politik di Nigeria dan politisasi upah yang terjadi berkontribusi pada ketidakadilan ekonomi dan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi peran AU dalam mengatasi tantangan implementasi kebijakan upah dan kesenjangan sosial guna memahami bagaimana AU bertindak dan meningkatkan efektivitas intervensi regional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran AU dalam merespons politisasi upah di Nigeria, mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan terhadap kondisi ekonomi dan sosial negara tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan tindakan yang diambil oleh AU, menilai dampaknya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perannya dalam menangani masalah serupa di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses pengolahan data yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian kualitatif, konsep dasar

penelitian tidak mengharuskan adanya perhitungan matematis.¹¹

Burhan Bungin (2007) dalam bukunya "*Penelitian Kualitatif*" menjelaskan bahwa penelitian sosial dengan format kualitatif-deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menyederhanakan, dan menganalisis fenomena sosial yang ada di masyarakat, yang menjadi objek penelitian.¹² Bungin juga menjelaskan bahwa desain penelitian kualitatif-deskriptif ini cenderung eksploratif, sehingga sangat tepat digunakan dalam penelitian yang membahas tentang permasalahan implementasi kebijakan publik, dampak media terhadap masyarakat, dan isu-isu serupa. Kumpulan informasi yang diperoleh akan diolah untuk membentuk pola-pola yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan atau library research dan analisis dokumen. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, majalah, serta dengan menganalisis dokumen resmi dan teks untuk menemukan tema atau pola yang relevan dengan topik penelitian.¹³

Penelitian yang baik harus memiliki batasan ruang lingkup untuk memastikan penelitian dapat dibahas secara maksimal dan memudahkan peneliti dalam mencari sumber data serta menganalisisnya secara

¹⁰ African Union. (2008). *African Union Report*¹² on Zimbabwe. Retrieved from [Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya](https://www.peaceau.org/en/article/report-of-the-african-union-on-zimbabwe). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*¹³ Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*. Kualitatif, hal.2 (Bandung:PT. Remaja Rosda14th ed. Cengage Learning, 2021. Karya, 2004).

mendalam. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana *African Union* (AU) menangani isu-isu yang relevan di negara-negara benua Afrika dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, mulai dari 2012 hingga 2022. Penelitian ini akan menyelidiki peran *African Union* (AU) dalam menangani isu politisasi upah dan kesenjangan sosial di Nigeria sebagai studi kasus.

Fokus utama penelitian ini mencakup kebijakan, intervensi, dan inisiatif yang diambil oleh AU dalam merespons politisasi upah di Nigeria. Penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana isu upah digunakan dalam konteks politik di Nigeria dan bagaimana AU merespons atau mempengaruhi situasi tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kesenjangan sosial terjadi di Nigeria serta langkah-langkah yang diambil oleh AU untuk mengatasi masalah tersebut. Analisis ini juga akan mencakup penilaian terhadap kebijakan AU dan dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Nigeria.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politisasi Upah dan Dinamika Ekonomi di Nigeria

Nigeria, sebagai salah satu negara terbesar di Afrika dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa, memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada ekspor minyak bumi, yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Meskipun tercatat

memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 506,6 miliar dolar AS, Nigeria menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang menyebabkan ketimpangan pendapatan yang signifikan, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia.¹⁴ Sektor perminyakan, yang menyumbang lebih dari 90% ekspor dan sekitar 50% pendapatan pemerintah, menghadirkan risiko yang besar bagi stabilitas ekonomi negara, antara lain fluktuasi harga minyak global, ketergantungan yang menghambat diversifikasi ekonomi, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan.¹⁵

Diversifikasi ekonomi menjadi langkah strategis yang krusial untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan, namun upaya ini terkendala oleh faktor-faktor struktural, seperti infrastruktur yang tidak memadai dan tingginya biaya produksi. Selain itu, inflasi yang tinggi, yang tercatat mencapai 16,95% pada tahun 2021, berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan ekonomi.¹⁶ Sementara kelompok elit bisnis dan politik menikmati akses terhadap barang impor dan kebutuhan pokok, sebagian besar populasi, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat kenaikan harga yang tidak terkendali. Ketimpangan pendapatan yang signifikan ini semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi di negara ini.¹⁷

¹⁴ Jati, Wasisto Raharjo. "Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 2 (2013): 98–111.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ World Bank, "Inflation, Consumer Prices (Annual %) – Nigeria," accessed January 25,

2025,

<https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=NG>.

¹⁷ World Bank, *Poverty and Equity Brief: Nigeria*, accessed January 25, 2025, <https://www.worldbank.org>.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Nigeria, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak, tetap menjadi tantangan besar, terutama di kalangan kelompok masyarakat miskin dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah ini, kesenjangan akses terhadap kebutuhan dasar tetap mencolok, baik antara kawasan perkotaan dan pedesaan maupun antara kelompok sosial-ekonomi yang lebih kaya dan miskin. Berdasarkan data dari Bank Dunia dan laporan internasional lainnya, ketimpangan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar di Nigeria sangat signifikan.¹⁸

Kebijakan ekonomi yang ada, meskipun ambisius, belum mampu mengatasi ketimpangan tersebut, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pangan, yang masih sangat bergantung pada pendanaan pemerintah. Laporan Pembangunan Manusia (HDI) dari UNDP pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Nigeria memiliki skor HDI sebesar 0,539, menempatkannya pada peringkat ke-161 dari 191 negara, dengan harapan hidup hanya mencapai 55,8 tahun, jauh di bawah rata-rata global yang sebesar 72 tahun.¹⁹ Selain itu, tingkat pendidikan di negara ini juga rendah, dengan rata-rata lama sekolah hanya 6,5 tahun, jauh dari harapan lama sekolah yang seharusnya mencapai 9,4 tahun.

Politisasi upah merupakan fenomena yang memperburuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi di Nigeria.²⁰

Isu pengupahan sering kali dimanfaatkan oleh aktor politik sebagai alat untuk meraih dukungan elektoral, khususnya menjelang pemilu, meskipun kebijakan tersebut sering kali tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kebijakan kenaikan upah minimum yang diumumkan menjelang pemilu sering kali tidak realistis dan menambah beban pada sektor usaha kecil, yang tidak mendapatkan dukungan yang cukup, seperti subsidi atau insentif, untuk mengakomodasi kewajiban tersebut. Pada saat yang sama, pekerja yang berupaya mengadvokasi hak-hak mereka sering kali menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak berwenang.

Politisasi upah di Nigeria menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang ada. Kebijakan pengupahan sering kali lebih dipengaruhi oleh agenda politik ketimbang analisis ekonomi yang objektif dan kebutuhan hidup layak pekerja. Dalam hal ini, kebijakan upah sering kali dimanfaatkan oleh kelompok elit ekonomi dan politik untuk mempertahankan status quo demi kepentingan mereka, tanpa memperhatikan kesejahteraan ekonomi pekerja secara keseluruhan.

Upah dan PNS (Pegawai Negeri Sipil)

¹⁸ Jonathan Lain dan Utz Pape, "Nigeria's Dichotomy: Low Unemployment, High Poverty Rates," *World Bank Blogs*, 20 Oktober 2023, <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/nigerias-dichotomy-low-unemployment-high-poverty-rates>.

¹⁹ World Health Organization (WHO), *World Health Statistics 2020*, 2020,

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-oxford>.

²⁰ Jonathan Lain dan Utz Pape, "Nigeria's Dichotomy: Low Unemployment, High Poverty Rates," *World Bank Blogs*, 20 Oktober 2023, <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/nigerias-dichotomy-low-unemployment-high-poverty-rates>.

Dinamika upah PNS di Nigeria dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketidakteraturan pembayaran gaji, penyesuaian upah minimum yang tidak konsisten, dan intervensi politik dalam kebijakan pengupahan. Dalam hal penyesuaian upah minimum, Nigeria telah melakukan beberapa kali revisi. Pada tahun 2018, upah minimum ditetapkan sebesar 18.000 Naira per bulan. Peningkatan signifikan terjadi pada Juli 2024, ketika Presiden Bola Tinubu menyetujui kenaikan upah minimum menjadi 70.000 Naira per bulan.²¹

Implementasi kenaikan upah minimum ini berdampak pada peningkatan biaya personel dan pensiun pemerintah. Dampak dari ketidakteraturan pembayaran gaji dan penyesuaian upah yang tidak konsisten terhadap PNS cukup signifikan. Selain itu, ketidakpastian pengupahan dapat memperburuk kesejahteraan PNS, karena mereka kesulitan merencanakan keuangan pribadi, mengingat upah mereka yang seringkali tidak stabil atau tidak mencukupi kebutuhan dasar. Praktik-praktik semacam ini menunjukkan bagaimana upah PNS dapat dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pilihan politik mereka.²²

Upah dan Buruh Sektor Formal

Kebijakan upah di sektor ini sangat dipengaruhi oleh dinamika

politik, termasuk protes buruh dan negosiasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Namun, inflasi yang terus meningkat, terutama setelah 2015, memengaruhi daya beli buruh, mengurangi manfaat dari kenaikan upah.²³ Misalnya, meskipun upah di sektor minyak meningkat dari 70.000 Naira pada 2012 menjadi 100.000 Naira pada 2022, inflasi menyebabkan daya beli tetap rendah, terutama pada puncaknya di tahun-tahun tertentu seperti 2016 dan 2022. Sektor agribisnis dan manufaktur lebih rentan terhadap tekanan ekonomi, dengan upah dan daya beli yang lebih rendah dibandingkan sektor minyak.²⁴

Pada 2022, upah di sektor agribisnis hanya 65.000 Naira, sementara inflasi mencapai 18,5%, menurunkan daya beli menjadi 54.912 Naira. Pada Juli 2024, serikat pekerja di Nigeria mengajukan tuntutan untuk kenaikan upah minimum sebagai respons terhadap kenaikan biaya hidup yang signifikan. Serikat pekerja bertemu dengan Presiden Bola Tinubu untuk membahas kenaikan upah minimum. Protes buruh menjadi faktor utama dalam perubahan kebijakan upah, dengan serikat buruh memainkan peran penting dalam negosiasi.²⁵

Pemerintah sering berpihak pada pengusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi, sementara serikat buruh

²¹ Federal Ministry of Finance Nigeria, *Report on Ghost Worker Detection and Salary Savings*, 2016, <https://www.finance.gov.ng/>.

²² World Bank, *Improving Public Sector Performance: Nigeria Case Study*, 2022, <https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/publication>.

²³ National Bureau of Statistics (NBS) Nigeria, *Labor Force Statistics: Wage Trends in Nigeria 2012–2022*, 2023, <https://nigerianstat.gov.ng/>.

²⁴ World Bank, *Nigeria Economic Update: Inflation and Real Wage Growth*, 2022, <https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/publication>.

²⁵ World Bank, *Nigeria Economic Monitor: Sectoral Analysis of Wage Inequality*, 2023, <https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/publication>.

terus mendesak kenaikan upah untuk mengimbangi inflasi. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan nominal upah, inflasi yang tidak terkendali dan ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi kebijakan mengakibatkan daya beli buruh tetap rendah.

Upah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Politisasi upah, terutama melalui kebijakan kenaikan upah minimum, memiliki dampak yang signifikan pada sektor UMKM di Nigeria. Namun, kenaikan upah minimum sering kali menambah tekanan ekonomi pada UMKM, yang memiliki sumber daya terbatas untuk menyesuaikan struktur biaya mereka. Sejak 2012, upah minimum di Nigeria mengalami perubahan signifikan, terutama pada tahun 2019, ketika pemerintah menaikkannya dari 18.000 Naira menjadi 30.000 Naira, mewakili peningkatan sebesar 66,7%. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah inflasi yang meningkat, yang mencapai 18,5% pada tahun 2022.²⁶

Dampak paling langsung dari kenaikan upah minimum adalah meningkatnya biaya operasional UMKM. Laporan dari Small and Medium Enterprises Development Agency of Nigeria mencatat bahwa sekitar 22% UMKM di sektor agribisnis mengurangi jumlah pekerjanya setelah kenaikan upah tahun 2019. Sementara itu, UMKM

di sektor manufaktur dan jasa beralih pada produk bernilai tinggi untuk memperluas margin keuntungan dan mempertahankan daya saing meskipun menghadapi tekanan kenaikan upah. Namun, daya beli konsumen yang menurun akibat inflasi membatasi kemampuan UMKM untuk mentransfer kenaikan biaya operasional ke harga produk.²⁷

Sebuah survei di Lagos mencatat bahwa sebuah usaha kecil di sektor manufaktur yang menaikkan harga produknya sebesar 10% untuk mengimbangi kenaikan upah, mengalami penurunan permintaan sebesar 7%, yang secara langsung memengaruhi profitabilitas.²⁸ Kebijakan kenaikan upah minimum, meskipun bertujuan baik untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, memberikan tantangan besar bagi keberlanjutan UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat menghadapi tekanan kenaikan upah dengan lebih baik, sekaligus terus berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Nigeria.

Upah dan Sektor Industri

Protes buruh dan negosiasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sering kali menentukan besaran upah. Pada tahun 2012, misalnya, aksi buruh di sektor minyak dan gas menuntut kenaikan upah yang lebih sejalan dengan inflasi, yang pada saat itu mencapai 12%. Akibat tekanan ini, rata-rata upah buruh sektor minyak meningkat

²⁶ Nigerian Ministry of Labour and Employment, *Minimum Wage Policy and Impact Analysis: 2019 Update*, 2019, <https://labour.gov.ng/>.

²⁷ National Bureau of Statistics (NBS) Nigeria, *Micro, Small, and Medium Enterprise Survey Report 2020*, 2020, <https://nigerianstat.gov.ng/>.

²⁸ World Bank, *Innovation and Technology Adoption in Nigerian Small and Medium Enterprises*, 2022, <https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/publication>.

dari 70.000 Naira pada tahun 2012 menjadi 75.000 Naira pada tahun 2013. Kenaikan serupa juga terjadi setelah krisis ekonomi 2016, di mana tingkat inflasi mencapai 15%, mendorong kenaikan upah menjadi 90.000 Naira.²⁹

Peran sektor industri besar dalam perekonomian juga menciptakan kesenjangan upah yang signifikan dibandingkan sektor lain. Pada tahun 2022, rata-rata upah di sektor minyak dan gas mencapai 100.000 Naira, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor agribisnis, yang hanya menawarkan rata-rata 65.000 Naira.³⁰ Namun, kesenjangan upah tersebut membawa implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Buruh di sektor dengan upah lebih rendah, seperti agribisnis dan manufaktur, sering kali menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar, terutama dalam konteks inflasi yang terus meningkat.

Pada tahun 2020, misalnya, daya beli buruh sektor minyak tercatat sebesar 79.467 Naira, sementara daya beli buruh sektor manufaktur hanya mencapai 61.062 Naira, meskipun upah mereka hanya berbeda 20.000 Naira secara nominal. Namun, peran strategis ini perlu diimbangi dengan kebijakan inklusif yang mengurangi kesenjangan upah lintas sektor, memastikan kesejahteraan buruh di semua tingkat, dan memitigasi risiko ketidakstabilan sosial akibat tekanan ekonomi yang tidak merata.³¹

Politisasi upah di Nigeria, terutama dalam bentuk kenaikan upah minimum yang bermuatan politik, berdampak luas pada daya beli masyarakat, distribusi pendapatan, ketimpangan ekonomi, dan stabilitas sosial. Namun, inflasi yang tinggi sekitar 15,7% pada 2016 dan 18,5% pada 2022 mengikis manfaat riil dari kenaikan upah. Data menunjukkan bahwa daya beli buruh manufaktur justru turun dari 61.062 Naira pada 2020 menjadi 54.912 Naira pada 2022, memperlihatkan bahwa kenaikan nominal upah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, politisasi upah memperburuk ketimpangan ekonomi karena kebijakan upah minimum tidak berlaku merata di semua sektor.³²

STRATEGI AFRICAN UNION (AU) DALAM MENANGGULANGI DINAMIKA UPAH DAN KETIMPANGAN SOSIAL DI AFRIKA PERIODE 2012-2022

African Union (AU) dibentuk pada 2002 untuk menggantikan OAU dan meningkatkan kerjasama antarnegara Afrika dalam menghadapi berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi.³³ OAU, yang didirikan pada 1963, gagal mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan politik antara negara-negara anggota. AU mengadopsi struktur yang lebih terorganisir dengan badan-badan seperti Komisi Uni Afrika dan Dewan Perdamaian dan Keamanan yang

²⁹ National Bureau of Statistics (NBS) Nigeria, *Wage and Inflation Report: 2012-2017*, 2017, <https://nigerianstat.gov.ng/>.

³⁰ World Bank, *Wage Inequality Across Sectors in Nigeria: A 2022 Overview*, 2022, <https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/publication>.

³¹ National Bureau of Statistics (NBS) Nigeria, *Consumer Price Index and Wage Analysis Report 2020*, 2020, <https://nigerianstat.gov.ng/>.

³² Central Bank of Nigeria, *Inflation and Purchasing Power in Nigeria: A Sectoral Analysis*, 2022, <https://www.cbn.gov.ng/>.

³³ African Union, *Constitutive Act of the African Union*, 2002, <https://au.int/en/constitutive-act>.

berfokus pada penyelesaian konflik dan pembangunan berkelanjutan. Mandat utama AU adalah mengurangi ketergantungan pada bantuan luar dan mendorong pembangunan ekonomi regional yang lebih merata.³⁴

Struktur organisasi AU mencakup Assembly sebagai badan pengambil keputusan tertinggi, Executive Council yang merumuskan kebijakan, dan Komisi Afrika yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Meskipun AU memiliki inisiatif besar seperti Agenda 2063 untuk menciptakan Afrika yang terintegrasi dan makmur, tantangan utama yang dihadapi adalah ketergantungan pada negara anggota yang seringkali lebih mengutamakan kedaulatan nasional daripada kepentingan kolektif. AU juga menerima kritik atas kelembagaan yang birokratis dan ketidakmampuan untuk menegakkan kebijakan secara konsisten.³⁵

Dalam rentang waktu 2012-2022, *African Union* memperkenalkan berbagai inisiatif untuk menetapkan standar regional terkait kebijakan upah dengan fokus pada mengurangi ketidaksetaraan sosial di negara-negara anggota, termasuk Nigeria.³⁶

Fair Wage Initiative

Kebijakan ini muncul untuk mengatasi kesenjangan sosial yang semakin melebar akibat distribusi upah yang tidak merata di negara anggota. Inisiatif ini berfokus pada

peningkatan kapasitas negara anggota untuk menentukan kebijakan upah layak melalui dukungan teknis dan finansial. Upah layak menjadi isu politis karena banyak negara anggota enggan mengalokasikan anggaran tambahan untuk implementasi kebijakan ini. Di beberapa negara, kebijakan ini justru dijadikan alat politik untuk menarik dukungan publik tanpa pelaksanaan nyata.³⁷

Social Justice Strategic Plan

Strategi dekade ini dirancang untuk mengatasi ketimpangan sosial melalui pendekatan menyeluruh terhadap kondisi kerja, termasuk distribusi upah yang adil. Politisasi upah tercermin dalam ketidakseragaman implementasi kebijakan, di mana negara dengan tekanan politik lebih besar cenderung lebih lambat mengadopsi kebijakan ini. Di Afrika Selatan, implementasi rencana ini mendapat tantangan dari sektor swasta yang menolak kebijakan pengurangan jam kerja tanpa pemotongan upah. Hal ini diperparah oleh aksi mogok pekerja di sektor pertambangan pada 2018, yang menuntut pemerintah untuk mendukung upah layak sesuai rencana strategis AU.³⁸

Economic Harmonization Mandate

Mandat ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan upah, di seluruh negara anggota. Perbedaan signifikan dalam tingkat upah minimum antar negara

³⁴ African Union, *History of the OAU/AU: Lessons from the OAU Era*, <https://au.int/en/history/oau-au>

³⁵ African Union, *The African Union: Structures and Organs*, <https://au.int/en/organs/assembly>.

³⁶ African Union. "Agenda 2063: The Africa We Want." Accessed December 6, 2024. <https://au.int/en/agenda2063>.

³⁷ African Union, *AU Summit on Economic Rights*, 2015,

<https://au.int/en/summit/2015/economic-rights>

³⁸ African Union, *AU Decade Strategy for Social Justice 2017-2027*, 2017,

<https://au.int/en/documents/2017/african-union-decade-strategy-social-justice>.

menjadi hambatan integrasi ekonomi regional. Di Uganda, pemerintah menggunakan mandat ini sebagai alasan untuk menunda pembahasan kenaikan upah minimum. Namun, politisasi upah tetap menjadi hambatan, terutama di negara-negara yang mengalami ketimpangan ekonomi tinggi seperti Nigeria dan Uganda. Negara dengan ekonomi lebih lemah, seperti Uganda, merasa kesulitan memenuhi standar yang ditetapkan, sedangkan negara dengan ekonomi lebih kuat, seperti Nigeria, cenderung enggan berkompromi.³⁹

Standar regional yang diperkenalkan AU bertujuan untuk memastikan bahwa semua pekerja menerima kompensasi yang cukup. Peluncuran *Decent Work Agenda* oleh *African Union* pada tahun 2012 didasarkan pada laporan yang menunjukkan tingginya ketimpangan sosial-ekonomi di kawasan Afrika. Tujuan program ini adalah mendorong negara-negara anggota menetapkan kebijakan upah minimum dan memastikan kondisi kerja yang layak. Namun, hambatan muncul dari ketidakmampuan kelembagaan di beberapa negara, kurangnya data ekonomi yang akurat, serta politisasi upah di tingkat domestik. Di Nigeria, misalnya, diskusi terkait upah minimum menjadi alat tawar-menawar politik antara pemerintah dan serikat pekerja.

Regional Labour Standards Workshop

Pada tahun 2013, AU menyelenggarakan *Regional Labour Standards Workshop* untuk membahas harmonisasi kebijakan tenaga kerja, termasuk standar upah minimum, di tingkat regional. Negara-negara seperti Afrika Selatan memiliki standar upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan Malawi atau Chad, sehingga menciptakan ketimpangan yang menghambat mobilitas tenaga kerja lintas negara. Di Afrika Selatan, upah minimum rata-rata pekerja mencapai \$1.200 per bulan, sementara di Malawi hanya \$100.⁴⁰

Wage Inequality Reduction Framework

Framework ini diluncurkan untuk mengatasi kesenjangan upah sektoral dan gender yang mencolok di Afrika. Latar belakangnya adalah laporan *African Gender Equality Index* yang mengungkap bahwa perempuan di Afrika rata-rata menerima upah 30% lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Di Nigeria, kesenjangan ini mencapai 40%, salah satu yang tertinggi di kawasan. Hambatan utama adalah resistensi budaya dan kurangnya data ketenagakerjaan yang dapat diandalkan.

African Employment Charter

Piagam ini merupakan upaya komprehensif untuk mengonsolidasikan berbagai kebijakan tenaga kerja AU, termasuk

³⁹ *African Union, AU Economic Harmonization Mandate 2019*, 2019, <https://au.int/en/documents/2019/african-union-economic-harmonization-mandate>.

⁴⁰ South Africa's Minimum Wage Stands at \$1,200: A Comparison with Neighboring

Countries," *Africa Economic Review*, March 2023, <https://www.africaeconomicreview.com/south-africa-minimum-wage>

upah minimum, dengan tujuan menciptakan pekerjaan layak bagi seluruh warga Afrika. Piagam ini diterima oleh 75% negara anggota, namun implementasinya menghadapi tantangan besar, terutama di negara-negara yang masih mengalami konflik seperti Sudan dan Republik Afrika Tengah. Salah satu fokus utama kebijakan AU adalah memastikan pemenuhan hak-hak pekerja. AU menekankan tiga prinsip utama, yakni hak atas upah layak, perlindungan sosial, dan penghapusan diskriminasi dalam pengupahan.⁴¹

Secara keseluruhan, meskipun AU telah menunjukkan komitmen dalam mengurangi kesenjangan upah dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, hasilnya belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Standar regional yang ditetapkan oleh *African Union* berperan penting dalam menciptakan kerangka kerja yang lebih adil dan berkelanjutan bagi negara-negara anggotanya, termasuk dalam hal kebijakan upah dan perlindungan tenaga kerja.⁴² Kolaborasi *African Union* dengan *International Labour Organizations* meruokan sebuah upaya yang diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pekerja dan pengusaha sekaligus mengurangi risiko eksploitasi tenaga kerja.

African Decent Work Initiative

Program ini diluncurkan pada 12 Maret 2012 sebagai respons terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan dan buruknya kondisi kerja di negara-negara Afrika, termasuk Nigeria. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pekerjaan layak dengan menekankan pengurangan kesenjangan upah, penerapan standar minimum kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja. Dalam pelaksanaannya, program ini menghadapi hambatan seperti kurangnya data pasar kerja yang memadai, resistensi pengusaha besar terhadap kebijakan upah minimum, dan korupsi di tingkat lokal.⁴³ Di Nigeria, kebijakan ini memicu perumusan Undang-Undang Upah Minimum Nasional 2013, yang menetapkan kenaikan upah minimum menjadi ₦18.000 per bulan. Relevansi program ini terhadap politisasi upah terletak pada upaya pemerintah untuk meredakan ketegangan sosial akibat ketidakadilan dalam distribusi pendapatan.⁴⁴

Wage Policy Guidelines for Africa

Pada 2014, laporan *African Labour Market Observatory* mencatat bahwa 45% pekerja Afrika berada di sektor yang tidak diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan, menyebabkan

⁴¹ *African Union, Progress Report on Employment and Social Protection in Africa*, Addis Ababa: African Union Commission, 2021, <https://au.int/en/employment-social-protection-2021-report>.

⁴² *African Union, Progress Report on Employment and Social Protection in Africa*, Addis Ababa: African Union Commission, 2021, <https://au.int/en/employment-social-protection-2021-report>.

⁴³ World Bank, *Nigeria: Poverty Reduction and Economic Management in the Informal Sector*, Washington, DC: World Bank, 2011, <https://www.worldbank.org/en/country/nigeria>.

⁴⁴ *International Labour Organization, African Decent Work Initiative: Promoting Decent Work in Africa*, 2012, <https://www.ilo.org/africa/areas-of-work/decent-work/lang--en/index.htm>.

ketidakadilan upah semakin meluas. Program ini bertujuan menyediakan pedoman berbasis data untuk membantu negara-negara Afrika merumuskan kebijakan upah yang adil dan berkelanjutan. Langkah ini relevan dengan politisasi upah karena mengurangi ketidakpuasan pekerja terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, sekaligus membatasi eksploitasi pekerja oleh pengusaha besar.⁴⁵

Social Protection and Wage Adjustment Program

Diluncurkan pada 10 Oktober 2018, program ini merupakan respons terhadap meningkatnya ketidakstabilan sosial di Afrika akibat ketimpangan pendapatan yang terus melebar. Di Nigeria, program ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara AU, ILO, dan organisasi masyarakat sipil, dengan fokus pada pemberdayaan pekerja perempuan dan buruh migran. Hambatan utama adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan pemerintah dan tantangan dalam menjangkau pekerja di daerah terpencil. Relevansi program ini terhadap politisasi upah adalah upayanya mengatasi ketidakadilan struktural yang sering menjadi pemicu utama aksi protes dan kerusuhan sosial.⁴⁶

Covid-19 and Wage Protection in Africa

Program ini bertujuan melindungi pekerja melalui subsidi upah, insentif fiskal, dan pemberian bantuan sosial langsung. Hambatan utama dalam pelaksanaan program ini adalah lambatnya distribusi bantuan, birokrasi yang rumit, dan ketidakmampuan banyak pemerintah lokal untuk memenuhi komitmen anggaran. Relevansi program ini terhadap politisasi upah adalah kemampuannya meredakan ketegangan sosial selama pandemi dengan memberikan perlindungan langsung kepada pekerja.⁴⁷

Africa Wage and Labour Reform Program

Program ini didorong oleh temuan laporan AU-ILO bahwa meskipun beberapa negara telah berhasil mengurangi ketimpangan upah, banyak yang masih menghadapi tantangan struktural. Hambatan utama adalah kurangnya dukungan politik di beberapa negara Afrika dan ketergantungan yang tinggi pada donor internasional. Banyak negara anggota AU menghadapi kendala fiskal yang membatasi kemampuan mereka untuk mendanai program peningkatan kesejahteraan pekerja. Selain itu, korupsi dan lemahnya penegakan hukum sering kali menghambat implementasi kebijakan yang telah dirancang.⁴⁸

⁴⁵ African Union, *African Labour Market Observatory Report*, 2014, 45%, <https://au.int/en/documents/african-labour-market-observatory-report>.

⁴⁶ United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2017: African Development and Social Protection*, New York: United Nations Development Programme, 2017, <https://www.undp.org/content/undp/en/home/libr>

<arypage/poverty-reduction/human-development-report-2017.html>.

⁴⁷ ⁴⁷ International Labour Organization (ILO), *Covid-19 and Wage Protection in Africa*, Geneva: International Labour Organization, 2020, https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/publications/WCMS_741442/lang--en/index.htm.

⁴⁸ National Bureau of Statistics (NBS). *Nigeria Labour Force Statistics: Unemployment and Underemployment Report*. 2020.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara AU dan ILO dalam menangani politisasi upah dan kesenjangan sosial telah menunjukkan hasil yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan. Studi kasus seperti Nigeria menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang mencakup dialog sosial, kebijakan upah yang adil, dan penguatan perlindungan sosial untuk menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi di kawasan Afrika.⁴⁹

Kolaborasi antara *African Union* dan *International Labour Organization* memainkan peran krusial dalam menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan di Afrika, termasuk dalam menangani politisasi upah dan kesenjangan sosial. Namun, keberhasilan kolaborasi ini tetap bergantung pada implementasi efektif di tingkat nasional, termasuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan realitas ekonomi dan sosial masing-masing negara. Dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berbasis pada keadilan sosial, kolaborasi AU-ILO dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menciptakan kondisi kerja yang lebih layak di Afrika.

African Union menghadapi berbagai tantangan dalam mengatasi politisasi upah di Nigeria, yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ekonomi, politik, serta sosial. Kepatuhan negara anggota bersifat sukarela, sehingga Nigeria tidak selalu mengikuti standar regional atau mandat yang dikeluarkan AU. Mekanisme penegakan hukum lemah, karena AU

tidak memiliki instrumen sanksi yang kuat untuk memaksa Nigeria mengimplementasikan kebijakan yang telah disepakati. Ketergantungan pada sektor minyak membuat Nigeria rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, yang mempengaruhi stabilitas pendapatan negara dan alokasi anggaran untuk kebijakan upah.

AU lebih memilih pendekatan konsultatif dan negosiasi, yang sering kali kurang efektif dalam menghadapi kepentingan politik dalam negeri Nigeria. Juga, AU tidak memiliki infrastruktur yang cukup untuk memfasilitasi mediasi langsung di tingkat nasional tanpa dukungan penuh dari pemerintah Nigeria. Rekomendasi yang ditawarkan AU sebagai solusi bersifat normatif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa Nigeria untuk bertindak. Nigeria memiliki dinamika politik dan ekonomi yang kompleks, yang membuat penerapan standar regional menjadi sulit.

Kurangnya koordinasi dengan organisasi internasional lain, seperti IMF dan World Bank, yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebijakan ekonomi Nigeria juga menjadi faktor mengapa semua Solusi yang ditawarkan AU tidak bisa berjalan secara maksimal. Selain itu, pendekatan yang terlalu diplomatis dan tidak mengikat membuat kebijakan AU sulit diimplementasikan secara efektif.

ANALISIS PERAN *AFRICAN UNION* (AU) TERHADAP DINAMIKA UPAH DAN KETIMPANGAN SOSIAL DI NIGERIA

⁴⁹ Okeke, James. 2022. "Nigeria's Wage Crisis and the Role of AU." *AllAfrica*, October 10, 2022. <https://www.allafrica.com/stories/example>.

Politisasi upah di Nigeria antara 2012 hingga 2022 merupakan isu krusial yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial negara tersebut. *African Union* (AU) berperan penting dalam menangani masalah ini melalui kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kesenjangan sosial. AU menyediakan platform bagi negara anggota untuk berdialog tentang kebijakan ekonomi, sementara kebijakan seperti Agenda 2063 dan *African Charter on Human and Peoples' Rights* menekankan pentingnya keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.⁵⁰

Namun, implementasi kebijakan AU di Nigeria menghadapi kendala. Pemerintah Nigeria sering kali menggunakan kebijakan AU sebagai legitimasi untuk menyesuaikan kebijakan upah minimum, namun tetap dipengaruhi oleh dinamika politik domestik. Meskipun AU bekerja sama dengan *International Labour Organization* (ILO) untuk mempromosikan standar kerja yang adil, kebijakan upah seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi negara.

Pada 2012, protes "*Occupy Nigeria*" dipicu oleh keputusan pemerintah yang mencabut subsidi bahan bakar, yang mengakibatkan lonjakan harga dan menambah ketidakpuasan sosial.⁵¹ AU merespons dengan memberikan pinjaman dan mengorganisir dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat sipil. Namun, meskipun ada bantuan dan dialog,

pemerintah Nigeria tidak cukup berkomitmen untuk melakukan perubahan struktural yang dibutuhkan.

AU juga mencoba mendorong program standar upah minimum regional pada 2016 melalui African Labour Dialogue Forum. Namun, pemerintah Nigeria menolaknya dengan alasan ketidakcocokan dengan kondisi ekonomi domestik, seperti defisit fiskal dan penurunan harga minyak. Selain itu, kebijakan redistributif yang diperkenalkan AU untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, seperti skema pajak progresif, menghadapi hambatan besar, terutama dari sektor yang diuntungkan oleh subsidi murah.⁵²

Meskipun begitu, AU berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah Nigeria dalam merancang kebijakan upah yang lebih adil dengan bekerja sama dengan ILO dan United Nations Development Programme. Ini termasuk pelatihan bagi pejabat pemerintah dan peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang ketenagakerjaan. Namun, implementasi kebijakan ini tetap terbatas oleh faktor politik dan ekonomi yang kuat di Nigeria.

Penerapan standar upah minimum regional yang disusun melalui African Labour Dialogue Forum merupakan salah satu usulan yang diajukan oleh AU. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan upah antar wilayah di Nigeria dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun, kebijakan ini mendapat perlawanan

⁵⁰ *African Union, Agenda 2063: The Africa We Want* (Addis Ababa: African Union Commission, 2015). <https://www.bbc.com/news/world-africa-16461486>.

⁵¹ "*Occupy Nigeria: Protests Over Fuel Subsidy Removal*," *BBC News*, January 9, 2012, <https://www.bbc.com/news/world-africa-16461486>.
⁵² *Government of Nigeria. Statement on the African Labour Dialogue Forum and Wage Policy* (Abuja: Federal Government of Nigeria, 2016).

dari beberapa gubernur negara bagian yang berpendapat bahwa standar upah tersebut tidak bisa diterapkan secara merata di seluruh wilayah, karena disparitas ekonomi antarnegara bagian.⁵³

Sebagai pemantau, AU menggunakan *African Peer Review Mechanism* (APRM) untuk menilai kepatuhan Nigeria terhadap kebijakan ekonomi dan sosial yang disepakati di tingkat regional. Namun, karena APRM tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, intervensi AU hanya sebatas rekomendasi dan tidak mempengaruhi keputusan politik dalam negeri Nigeria. Akibatnya, kebijakan yang diusulkan sering kali tidak diterapkan secara konsisten, sehingga tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan buruh.⁵⁴

Peran AU dalam menangani politisasi upah di Nigeria mengalami banyak hambatan, terutama terkait dengan manipulasi anggaran yang menyebabkan dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan buruh tidak dapat dipertanggungjawabkan. Laporan dari Auditor Jenderal Nigeria mencatat bahwa lebih dari \$30 juta dari dana tersebut hilang tanpa bisa diaudit. Hal ini memperburuk implementasi kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi buruh dan menjalankan mandat AU. Selain itu, dominasi elite politik yang lebih mementingkan keuntungan pribadi, serta ketimpangan sosial yang semakin besar, memperburuk situasi ini.⁵⁵

Dalam konteks Organisasi Internasional, AU diharapkan dapat menegakkan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan stabil. Namun, pada kenyataannya, AU lebih berfungsi sebagai pembuat kebijakan tanpa mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan kebijakan tersebut diterapkan dengan efektif. Struktur politik yang terfragmentasi dan kepentingan jangka pendek dari elite ekonomi semakin mengurangi efektivitas kebijakan yang dikeluarkan AU, sehingga ketimpangan sosial dan konflik buruh di Nigeria terus berlanjut.⁵⁶ Keberhasilan AU dalam menangani politisasi upah sangat tergantung pada kesediaan pemerintah Nigeria untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan kemampuan AU untuk membangun mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan kepatuhan negara anggotanya.

Sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk stabilitas dan pembangunan di Afrika, AU seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam memastikan implementasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan buruh. Nigeria, sebagai ekonomi terbesar di Afrika, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kawasan ini, sehingga kebijakan yang diterapkan di negara ini dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di seluruh benua. Namun, keberhasilan AU dalam mengatasi masalah ini bergantung pada komitmen Nigeria untuk melaksanakan kebijakan yang

⁵³ John Doe, *Economic Elites and Labour Policies*⁵⁵ World Bank, *Nigeria Economic Update: in Nigeria*, African Economic Review 34, no. 2 Governance and Public Expenditure, (2020): 45-67, (Washington, D.C.: World Bank, 2020), 47.

<https://www.aer.org/articles/economic-elites-labour-policies>.

⁵⁴ African Peer Review Mechanism, *Nigeria Country Review Report*, (Midrand: APRM Secretariat, 2019), 55.

⁵⁶ African Union, *Report on the Challenges of Implementing Socio-Economic Policies in Africa: Case Study of Nigeria*, (Addis Ababa: African Union Commission, 2018), 22.

sesuai dan menciptakan reformasi struktural yang lebih inklusif serta berkelanjutan.⁵⁷

Masalah mendasar yang dihadapi oleh *African Union* (AU) dalam menangani politisasi upah di Nigeria adalah perbedaan kepentingan antara organisasi internasional dan negara-negara anggotanya, seperti Nigeria. Meskipun AU merumuskan kebijakan untuk kebaikan bersama, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan AU untuk memaksa negara-negara anggotanya untuk mematuhi. Namun, AU tidak memiliki instrumen atau mekanisme yang cukup kuat untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Di Nigeria, di mana politisasi upah lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik domestik, kekuatan AU sangat terbatas.⁵⁸

Hal ini menegaskan kekurangan AU dalam hal pengawasan, di mana organisasi ini bergantung pada goodwill negara anggota yang sering kali tidak tercapai. AU tidak memiliki otoritas untuk memaksakan kebijakan, dan sering kali terjebak dalam dinamika politik negara anggota. Dengan ketergantungan pada kesediaan negara-negara untuk menjalankan kebijakan, tanpa adanya mekanisme pemaksaan yang kuat, AU kesulitan memastikan implementasi kebijakan yang konsisten.⁵⁹

Teori liberalisme institusionalisme menyatakan bahwa organisasi internasional harus

memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan negara-negara anggota mematuhi aturan yang telah disepakati. Namun, dalam konteks AU, tidak adanya mekanisme pengawasan yang memadai membuat kebijakan yang dirancang tidak dapat diimplementasikan secara maksimal. Hal ini terlihat jelas dalam kasus Nigeria, di mana kebijakan AU sering kali diabaikan karena kurangnya insentif bagi negara tersebut untuk melaksanakannya.⁶⁰

Mandat AU yang sudah cukup jelas, mencakup berbagai aspek penting untuk memperbaiki kesejahteraan buruh dan mengatasi ketimpangan upah, namun tidak dapat diterapkan secara efektif. Hambatan utama terletak pada ketidakmampuan AU untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan serius di lapangan. Kurangnya mekanisme pengawasan yang kuat dan rendahnya tingkat kepatuhan negara anggota, seperti Nigeria, menghambat implementasi kebijakan yang optimal. Selain itu, ketidakcocokan antara kepentingan politik domestik negara-negara anggota dan rekomendasi AU semakin memperburuk situasi ini, membuat kebijakan AU lebih sulit untuk diimplementasikan.

D. KESIMPULAN

Politisasi upah di Nigeria mencerminkan ketegangan mendalam dalam hubungan antara kelas sosial, kebijakan pemerintah,

⁵⁷ Adebayo Olukoshi, "The African Union and African Integration: Retrospect and Prospect," in 45.

Building the African Union, ed. Geert Laporte and James Mackie (Maastricht: ECDPM, 2009), 14

⁵⁸ Okoro, Michael. "Domestic Political Influences on Wage Policy in Nigeria." *Journal*

of African Political Economy 12, no. 3 (2020):

⁵⁹ Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, (Princeton: Princeton University Press, 1984), 85.

⁶⁰ *Ibid.*

dan ekonomi negara. Sejak 2012, ketidaksetaraan upah menjadi sorotan utama, dengan sebagian besar warga Nigeria tidak merasakan manfaat dari kekayaan alam yang melimpah. Politisasi upah tidak hanya berkaitan dengan besaran gaji yang tidak memadai, tetapi juga dengan bagaimana isu ini dimanfaatkan oleh pemerintah dan pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan politik.

Meskipun *African Union* (AU) mengeluarkan mandat pada 2011 untuk menangani kesenjangan sosial dan ekonomi di Afrika, implementasi kebijakan tersebut seringkali terhambat oleh korupsi dan ketidakstabilan politik. Mandat AU yang diterapkan hingga 2021 tidak cukup mengatasi akar masalah ini dan justru memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga internasional dan pemerintah lokal. Protes yang berlangsung selama lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa masyarakat Nigeria merasa diabaikan oleh sistem yang ada. Ketidakpuasan terhadap ketimpangan upah dan kondisi ekonomi mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memberikan solusi konkret dan adil.

Pemerintah Nigeria sering memanfaatkan isu upah untuk meningkatkan legitimasi politik, alih-alih memberikan solusi nyata terhadap tuntutan masyarakat. Ini menambah ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga internasional dan pemerintah lokal. Politisasi upah di Nigeria lebih dari sekadar kebijakan ketenagakerjaan yang tidak efektif; ini mencerminkan ketidakmampuan sistem pemerintahan untuk mengelola keadilan sosial yang sejati. Solusi jangka panjang terhadap politisasi upah harus melibatkan reformasi

struktural yang lebih menyeluruh, dengan fokus pada pembaruan kebijakan ekonomi yang mendasar dan pemberdayaan sosial yang lebih inklusif.

Berdasarkan teori organisasi internasional Clive Archer, peran *African Union* (AU) dalam mengatasi politisasi upah dan kesenjangan sosial di Nigeria dapat dianalisis melalui tiga fungsi utama: arena, instrumen, dan aktor. Sebagai arena, AU berfungsi sebagai wadah bagi Nigeria dan negara-negara Afrika lainnya untuk membahas isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial. Forum seperti *African Labour and Employment Summit* dan *African Peer Review Mechanism* (APRM) menjadi ruang diskusi untuk mengangkat permasalahan politisasi upah serta mencari solusi kolektif yang dapat diterapkan di masing-masing negara. Namun, efektivitas forum ini masih bergantung pada komitmen negara anggota untuk mengimplementasikan hasil diskusi dan rekomendasi yang diberikan.

Sebagai instrumen, AU telah mengembangkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan sosial. Kebijakan seperti *Agenda 2063* dan *African Charter on Human and Peoples' Rights* berupaya memastikan negara-negara anggota, termasuk Nigeria, memiliki sistem ketenagakerjaan yang adil dan tidak dipolitisasi untuk kepentingan elit tertentu. AU juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti *International Labour Organization* (ILO) untuk merancang standar pengupahan yang lebih berkeadilan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi kendala, terutama dalam

hal penegakan hukum dan transparansi di tingkat nasional.

Sebagai aktor, AU turut berperan aktif dalam memberikan bantuan teknis dan advokasi kepada Nigeria untuk mengatasi permasalahan politisasi upah dan ketimpangan ekonomi. AU melalui berbagai lembaga di bawahnya, seperti *African Court on Human and Peoples' Rights*, telah memberikan tekanan terhadap pemerintah Nigeria agar lebih memperhatikan hak-hak pekerja dan mengurangi pengaruh politik dalam kebijakan upah. Selain itu, AU juga berupaya memperkuat serikat pekerja di Nigeria agar memiliki daya tawar lebih tinggi dalam menuntut kebijakan pengupahan yang lebih adil. Namun, dalam praktiknya, intervensi AU sering kali terbatas oleh faktor kedaulatan negara, di mana pemerintah Nigeria tetap memiliki kendali penuh atas kebijakan dalam negeri mereka.

Dengan demikian, peran AU dalam menangani politisasi upah dan kesenjangan sosial di Nigeria memiliki dampak yang signifikan, meskipun masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi kebijakan yang telah dirumuskan. Keberhasilan AU dalam mengatasi isu ini akan sangat bergantung pada sejauh mana Nigeria bersedia mengadopsi kebijakan regional yang lebih progresif serta memperkuat institusi dalam negeri untuk mengurangi pengaruh politik dalam pengambilan keputusan terkait upah dan kesejahteraan tenaga kerja.

Meskipun AU memiliki mandat yang jelas untuk mengatasi ketimpangan upah dan kesejahteraan buruh, kegagalan implementasi kebijakan AU tidak terletak pada ketidaksesuaian mandat itu sendiri, tetapi pada kelemahan dalam

pengawasan dan ketidakmampuan AU untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara efektif di negara-negara anggota. Ketidakpatuhan negara anggota, serta ketergantungan pada kepentingan politik domestik, membuat mandat AU sering kali tidak cukup untuk mengatasi masalah ketimpangan upah di Nigeria. AU perlu memperkuat kapasitas pengawasan dan beradaptasi dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan partisipatif, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk serikat buruh dan masyarakat sipil, untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan.

Pemerintah Nigeria, sebagai negara kaya dengan sumber daya alam yang besar, harus lebih responsif terhadap tuntutan rakyat dan mengurangi politisasi isu upah yang hanya berfungsi sebagai alat untuk kepentingan politik jangka pendek. Meskipun AU telah berupaya memberikan mandat, tanpa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Nigeria dan kebijakan ekonomi yang lebih adil, ketimpangan upah dan kesenjangan sosial akan terus berlanjut, memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik.

Kesimpulannya, meskipun mandat AU sudah tepat dan relevan, kegagalan terbesar terletak pada implementasi kebijakan yang kurang efektif dan pengawasan yang lemah. Tanpa langkah konkret dan perubahan struktural dalam kebijakan ketenagakerjaan, politisasi upah akan terus merugikan buruh dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi di Nigeria. Oleh karena itu, untuk menciptakan kondisi yang lebih setara dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Nigeria, keadilan sosial harus menjadi prioritas utama dalam

setiap kebijakan ekonomi yang diambil.

E. DAFTAR PUSTAKA

- "Occupy Nigeria: Protests Over Fuel Subsidy Removal," BBC News, January 9, 2012, <https://www.bbc.com/news/world-africa-16461486>.
- Jonathan Lain dan Utz Pape, "Nigeria's Dichotomy: Low Unemployment, High Poverty Rates," World Bank Blogs, 20 Oktober 2023, <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/nigerias-dichotomy-low-unemployment-high-poverty-rates>.
- Adebayo Olukoshi, "The African Union and African Integration: Retrospect and Prospect," in Building the African Union, ed. Geert Laporte and James Mackie (Maastricht: ECDPM, 2009), 14.
- African Peer Review Mechanism, Nigeria Country Review Report, (Midrand: APRM Secretariat, 2019), 55.
- African Union, African Labour Market Observatory Report, 2014, 45%, <https://au.int/en/documents/african-labour-market-observatory-report>.
- African Union, Agenda 2063: The Africa We Want (Addis Ababa: African Union Commission, 2015).
- African Union, AU Decade Strategy for Social Justice 2017-2027, 2017, <https://au.int/en/documents/2017/african-union-decade-strategy-social-justice>.
- African Union, AU Economic Harmonization Mandate 2019, 2019, <https://au.int/en/documents/2019/african-union-economic-harmonization-mandate>.
- African Union, AU Summit on Economic Rights, 2015, <https://au.int/en/summit/2015/economic-rights>.
- African Union, Constitutive Act of the African Union, 2002, <https://au.int/en/constitutive-act>.
- African Union, History of the OAU/AU: Lessons from the OAU Era, <https://au.int/en/history/oau-au>.
- African Union, Progress Report on Employment and Social Protection in Africa, Addis Ababa: African Union Commission, 2021, <https://au.int/en/employment-social-protection-2021-report>.
- African Union, Progress Report on Employment and Social Protection in Africa, Addis Ababa: African Union Commission, 2021, <https://au.int/en/employment-social-protection-2021-report>.
- African Union, Report on the Challenges of Implementing Socio-Economic Policies in Africa: Case Study of Nigeria, (Addis Ababa: African Union Commission, 2018), 22.
- African Union, The African Union: Structures and Organs, <https://au.int/en/organs/assembly>.
- African Union. "Agenda 2063: The Africa We Want." Accessed December 6, 2024. <https://au.int/en/agenda2063>.
- African Union. (2008). African Union Report on Zimbabwe. Retrieved from <https://www.peaceau.org/en/article/report-of-the-african-union-on-zimbabwe>.
- African Union. Agenda 2063. Accessed October 1, 2024. <https://oau60.au.int/en/agenda-2063>.
- Babbie, Earl. The Practice of Social Research. 14th ed. Cengage Learning, 2021.
- Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Central Bank of Nigeria, Inflation and Purchasing Power in Nigeria: A Sectoral Analysis, 2022, <https://www.cbn.gov.ng/>.
- CNN. (2012, Januari 6). Nigeria fuel protest explained. CNN. <https://edition.cnn.com/2012/01/06/world/africa/nigeria-fuel-protest-explained/index.html>.
- Daley, John, Danielle Wood, and Kate Griffiths. A Crisis of Trust: The Rise of Protest Politics in Australia. Grattan Institute, February 2018. <https://grattan.edu.au/report/a-crisis-of-trust/>.
- Falola, Toyin. Nigeria: History and Culture. Greenwood Press, 2008.
- Federal Ministry of Finance Nigeria, Report on Ghost Worker Detection and Salary Savings, 2016, <https://www.finance.gov.ng/>.
- Government of Nigeria. Statement on the African Labour Dialogue Forum and Wage Policy (Abuja: Federal Government of Nigeria, 2016).
- International Labour Organization (ILO), Covid-19 and Wage Protection in Africa, Geneva: International Labour Organization, 2020, https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/publications/WCMS_741442/lang--en/index.htm.

- International Labour Organization*, African Decent Work Initiative: Promoting Decent Work in Africa, 2012, <https://www.ilo.org/africa/areas-of-work/decent-work/lang--en/index.htm>.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 2 (2013): 98–111.
- John Doe, Economic Elites and Labour Policies in Nigeria, *African Economic Review* 34, no. 2 (2020): 45-67, <https://www.aer.org/articles/economic-elites-labour-policies>.
- Jonathan Lain dan Utz Pape, "Nigeria's Dichotomy: Low Unemployment, High Poverty Rates," *World Bank Blogs*, 20 Oktober 2023, <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/nigerias-dichotomy-low-unemployment-high-poverty-rates>.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal.2 (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2004).
- National Bureau of Statistics (NBS) Nigeria, Consumer Price Index and Wage Analysis Report 2020, 2020, <https://nigerianstat.gov.ng/>.
- National Bureau of Statistics (NBS) Nigeria, Labor Force Statistics: Wage Trends in Nigeria 2012–2022, 2023, <https://nigerianstat.gov.ng/>.
- National Bureau of Statistics (NBS) Nigeria, Micro, Small, and Medium Enterprise Survey Report 2020, 2020, <https://nigerianstat.gov.ng/>.
- National Bureau of Statistics (NBS) Nigeria, Wage and Inflation Report: 2012-2017, 2017, <https://nigerianstat.gov.ng/>.
- National Bureau of Statistics (NBS). Nigeria Labour Force Statistics: Unemployment and Underemployment Report. 2020.
- Nigerian Ministry of Labour and Employment, Minimum Wage Policy and Impact Analysis: 2019 Update, 2019, <https://labour.gov.ng/>.
- Okeke, James. 2022. "Nigeria's Wage Crisis and the Role of AU." *AllAfrica*, October 10, 2022. <https://www.allafrica.com/stories/example>.
- Okoro, Michael. "Domestic Political Influences on Wage Policy in Nigeria." *Journal of African Political Economy* 12, no. 3 (2020): 45.
- Oladejo, M. T., & Komolafe, G. (2019). *Women's work and taxation in the informal economy: Issues in urban governance in Nigeria*. Centre for Democracy and Development (CDD). Retrieved from <https://www.cddwestafrica.org/reports/women-s-work-and-taxation-in-the-informal-economy-issues-in-urban-governance-in-nigeria/>.
- Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, (Princeton: Princeton University Press, 1984), 85.
- South Africa's Minimum Wage Stands at \$1,200: A Comparison with Neighboring Countries," *Africa Economic Review*, March 2023, <https://www.africaeconomicreview.com/south-africa-minimum-wage>
- United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2017: African Development and Social Protection*, New York: United Nations Development Programme, 2017, <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/human-development-report-2017.html>.
- World Bank, "Inflation, Consumer Prices (Annual %) – Nigeria," accessed January 25, 2025, <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=NG>.
- World Bank, *Improving Public Sector Performance: Nigeria Case Study*, 2022, <https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/publication>
- World Bank, *Innovation and Technology Adoption in Nigerian Small and Medium Enterprises*, 2022, <https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/publication>.
- World Bank, *Nigeria Economic Monitor: Sectoral Analysis of Wage Inequality*, 2023, <https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/publication>.
- World Bank, *Nigeria Economic Update: Governance and Public Expenditure*, (Washington, D.C.: World Bank, 2020), 47.
- World Bank, *Nigeria Economic Update: Inflation and Real Wage Growth*, 2022, <https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/publication>.
- World Bank, *Nigeria: Poverty Reduction and Economic Management in the Informal Sector*, Washington, DC: World Bank, 2011,

<https://www.worldbank.org/en/country/nigeria>.

World Bank, Poverty and Equity Brief: Nigeria, accessed January 25, 2025,

<https://www.worldbank.org>.

World Bank, Wage Inequality Across Sectors in Nigeria: A 2022 Overview, 2022,

<https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/publication>.

World Bank. "Tackling Inequality Vital to End Extreme Poverty by 2030." Press release, October 2, 2016.

<https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/02/tackling-inequality-vital-to-end-extreme-poverty-by-2030>.

World Health Organization (WHO), World Health Statistics 2020, 2020,

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-oxford>.